

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 1, November 2023, Halaman 168-178
e-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7978399>

Analisis Kontribusi PBB dan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi Periode 2011-2016

Abdul Latif^{1*}

¹Universitas Pelita Bangsa

*Email korespondensi: abdullatif@pelitabangsa.ac.id

Abstrak

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka hal ini sudah tentu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Maka pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah. Bekasi adalah zona ekonomi, zona industri, dan banyak lagi. Tentunya besar pula sumber-sumber kontribusi kepada pemerintah dari daerah, terutama pajak daerah PBB dan BPHTB yang begitu besar pula kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah pengaruh PBB dan BPHTB terhadap PAD Kabupaten Bekasi dari periode 2011-2016, serta factor- faktor peningkatan kontribusi pajak daerah. Metodologi penelitian ini menggunakan analisa deskriptif, dan kuantitatif, di mana data yang sudah diambil adalah data *sekunder* yang diambil langsung dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa PBB dan BPHTB tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan taraf signifikansi yang diajukan alpha 0.05 atau 5%, lain halnya PBB dan BPHTB secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi.

Kata Kunci : Pajak daerah, Pendapatan Asli Daerah, PBB, BPHTB

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka dalam hal ini sudah tentu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah. Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah (Desentralisasi). Sejalan dengan desentralisasi tersebut, aspek pembiayaannya juga ikut terdesentralisasi (Elmi, 2002). Implikasinya, daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri biaya pembangunannya. Tanggung jawab perencanaan sumber dana bagi pembangunan ekonomi di daerah berada pada pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayahnya, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah (Memah, 2013). Khususnya pada otonomi daerah saat ini, daerah diberikan kekuasaan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa "Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri daerah pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan" (UU No.32,2004) (kemenkeu.go.id, 2004). Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

pembangunan nasional sudah dikenal di Indonesia. Pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Untuk dapat merealisasikan pembangunan itu diperlukan dana yang sangat besar. Salah satunya, diperoleh dari pajak. Salah satu jenis pajak yang penerimaan sangat potensial adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dapat memberikan peran penting dalam pembangunan. Pada awalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikelola pemerintah pusat, tetapi kini diserahkan ke pemerintah daerah. Seiring dengan otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal, tanggal 1 Januari 2011 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah Kabupaten Bekasi, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) khususnya sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah Kabupaten Bekasi dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 (Ratnawati & Hernawati, 2016). Pengalihan wewenang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah menjadi sumber pendapatan daerah yang cukup besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Salah satunya diperoleh dari pajak. Salah satu jenis pajak yang penerimaan sangat potensial adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dapat memberikan peran penting dalam pembangunan (Badrudin, 2012). Pada awalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikelola Pemerintah Pusat, tetapi kini diserahkan ke Pemerintah Daerah, khususnya sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah Kabupaten Bekasi dimulai pada tanggal 1 Januari 2013.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Saputro et al., 2014) bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi sumber pendapatan daerah yang cukup besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi, hal ini terdapat pengaruh antara perolehan pajak PBB dan pajak BPHTB terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi. Pengalihan wewenang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah menjadi sumber pendapatan daerah yang cukup besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan uraian di atas, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi.

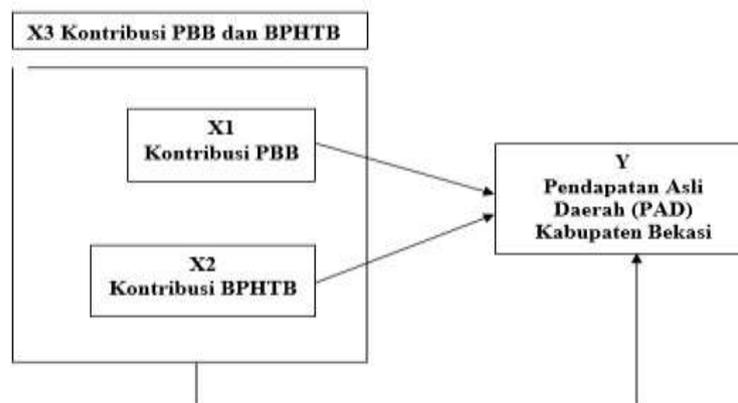
Menurut (Rachim & Abd, 2015) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. (Handoko, 2013) Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah dan bangunan, PBB merupakan pajak pusat yang demikian hampir seluruh realisasi

penerimaan PBB di serahkan kepada pemerintah daerah baik Propinsi, kabupaten / kota (Prasetyo, 2014). PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan *UU No. 12 Tahun 1985* tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah dirubah dengan *UU No. 12 Tahun 1994*. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam artian besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajakyaitu bumi dan bangunan (Harjawati, 2016).

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap perolehan hak atas tanah atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam *undang-undang nomor 5 tahun 1960* tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Cleveland, 2012). Subjek Pajak Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Objek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan.



Gambar 1. Desain Penelitian

METODE

Jenis Penelitian

Dikarenakan penelitian ini berusaha untuk mengetahui kontribusi PBB dan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi, maka metode penelitian yang digunakan mengacu pada *metode kuantitatif deskriptif*, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan variabel (Siyoto & Sodik, 2015). Jenis data dalam penelitian ini termasuk dalam *data sekunder*, yaitu data yang diambil dari data yang telah ada/tersedia. Data tersebut mencakup semua data Pendapatan Asli Daerah.

Pengukuran Variabel

Tabel 1. Pengukuran Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Dependent Variable XI (Kontribusi PBB) (Suhono & Sulastri, 2017)	<u>Realisasi PBB X 100%</u> Realisasi PAD	Rasio
2	Dependent Variable X2 (Kontribusi BPHTB) (Shoup, 2004)	<u>Realisasi BPHTB X 100%</u> Realisasi PAD	Rasio

3	Kontribusi PBB dan BPHTB (X3)	<u>Realisasi PBB & BPHTB X100%</u> Realisasi PAD	Rasio
4	<i>Independent Variable Y</i> (Pendapatan Asli Daerah) (Atakpa et al., 2012)	Besaran Pendapatan Asli Daerah Dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.	Rasio

Sumber: Diolah Peneliti

Populasi dan Sampel

Populasi yang penulis ambil meneliti kontribusi PBB dan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi. Sampel data yang penulis ambil yaitu data pajak-pajak daerah Kabupaten Bekasi dari tahun 2011-2016. Terkait dengan itu penulis menganalisa data-data yang aktual dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi dan sampel-sampel yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini adalah data pajak daerah Kabupaten Bekasi

Teknik Analisa Data

Uji Kelayakan Model, tahapan pertama pelaksanaan analisis pada penelitian ini melalui kelayakan model atau uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini merupakan uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Untuk mengetahui apakah model regresi yang akan digunakan telah memenuhi kriteria BLUE maka perlu dilakukan serangkaian pengujian yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas yang akan dibahas lebih lanjut satu per satu pada bagian selanjutnya (Siyoto & Sodik, 2015).

Analisis Regresi Linier Berganda, untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda (*multiple regression*). Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variable independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel dependen mengalami kenaikan atau penurunan. Model hubungan variabel akan dianalisis sesuai dengan persamaan regresi yaitu :

$$Y = \alpha + bX^1 + bX^2 + e$$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah

α = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X^1 = Pajak Bumi dan Bangunan

X^2 = Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

e = Error

HASIL**Statistik Deskriptif**

Dari hasil tabulasi data yang penulis olah dalam alat analisa data Eviews 10 untuk analisis kontribusi PBB dan BPHTB terhadap PAD Kabupaten Bekasi periode 2011-2016, dapat diuraikan secara statistik deskriptif pada tabel dibawah ini.

Table 2. Statistik Deskriptif

Date: 08/13/17 Time: 17:55
Sample: 2011 2016

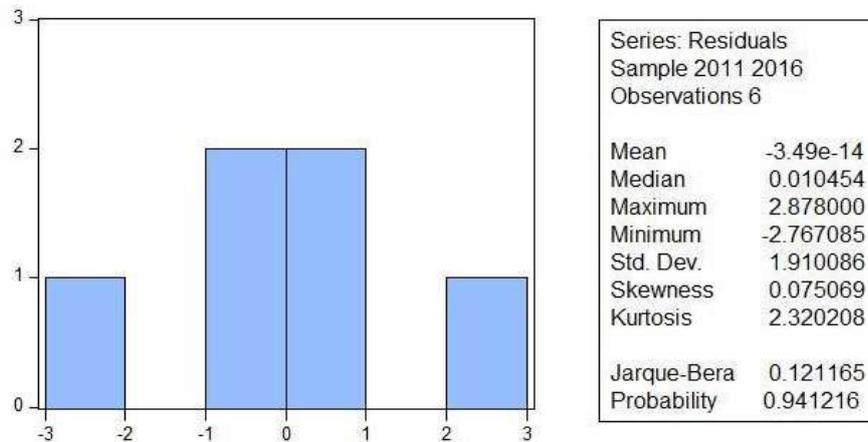
	BPHTB	PAD	PBB
Mean	36.09500	118.6600	21.11000
Median	36.21000	119.0850	18.13500
Maximum	46.36000	127.4200	31.54000
Minimum	23.62000	111.4700	16.70000
Std. Dev.	7.845992	5.784445	5.811341
Skewness	-0.333355	0.198285	1.108015
Kurtosis	2.305978	2.025736	2.659020
Jarque-Bera Probability	0.231542 0.890679	0.276615 0.870831	1.256764 0.533454
Sum	216.5700	711.9600	126.6600
Sum Sq. Dev.	307.7979	167.2990	168.8584
Observations	6	6	6

Variabel Independen PBB, Selama periode penelitian yang dilakukan kontribusi PBB terhadap PAD mencapai rata-rata 21.110%, dan nilai tengah selama periode 18.135%. Nilai maksimum kontribusi PBB terhadap PAD yang dicapai selama periode penelitian terjadi pada tahun 2011 dengan nilai 31.540%. Sedangkan kontribusi minimum PBB terhadap PAD terjadi pada tahun 2014 dengan nilai 16.700%. Sedangkan standar deviasi menunjukkan bahwa ukuran varian variable PBB sebesar 5.811% dari semua kasus varian yang terjadi dalam penelitian ini. Untuk ukuran kecondongan kurva dalam penelitian ini cenderung positif dengan nilai 1.108%. dan keruncingan kurva dalam penelitian ini positif dengan nilai 2.659%.

Variable Independen BPHTB, Selama periode penelitian yang dilakukan kontribusi BPHTB terhadap PAD mencapai rata-rata 36.095%. dan nilai tengah selama periode 36.210%. Nilai maksimum kontribusi yang dicapai selama periode penelitian sebesar 46.360% terjadi pada tahun 2011. Sedangkan kontribusi minimum terjadi pada tahun 2016 sebesar 23.620, dikarenakan data yang di dapat realisasi BPHTB untuk 2016 hanya sampai November. Sedangkan standar deviasi untuk variabel BPHTB sebesar 7.845%. Dari semua kasus varian yang terjadi dalam penelitian ini. Untuk ukuran kecondongan kurva dalam penelitian ini cenderung negatif dengan nilai -0.333%. dan keruncingan kurva dalam penelitian ini positif dengan nilai 2.305%.

Variabel Dependen PAD, Selama penelitian yang dilakukan pencapaian Pendapatan Asli Daerah tumbuh dengan rata-rata 118.660%, pencapaian ini bukan hanya dari kontribusi pajak daerah saja, dan pencapaian tengah selama periode 119.085% dari target 100% yang ditetapkan. Nilai maksimum pencapaian terjadi pada tahun 2011 sebesar 127.420% dari target 100% yang ditetapkan. Dan kontribusi minimum terjadi pada tahun 2016 dengan nilai 111.470%, karena data yang diterima adalah data Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi 90% di bulan November. Sedangkan standar deviasi untuk variabel dependen PAD adalah 5.784%, dari semua kasus varian yang terjadi dalam variabel penelitian ini. Untuk ukuran kecondongan kurva dalam penelitian ini cenderung positif dengan nilai 0.198%. dan keruncingan kurva dalam penelitian ini positif dengan nilai 2.025%

Uji Kelayakan Model Hasil Uji Normalitas Data



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Dari hasil output uji normalitas nilai probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung 0.941 lebih besar dari tingkat alpha 0.05 (5%). probabilitas JB > alpha 0.05, maka dapat disimpulkan residual terdistribusi normal dan asumsi klasik tentang kenormalan telah terpenuhi.

Hasil Uji Autokolerasi

Tabel 3. Hasil Uji Autokolerasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
F-statistic	0.876001	Prob. F(2,1)	0.6028	
Obs*R-squared	3.819769	Prob. Chi-Square(2)	0.1481	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID				
Method: Least Squares				
Date: 08/13/17 Time: 21:51				
Sample: 2011 2016				
Included observations: 6				
Presample missing value lagged residuals set to zero.				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.329662	11.05308	0.753605	0.5889
PBB	0.850541	0.903578	0.941303	0.5192
BPHTB	-0.731599	0.796950	-0.917998	0.5272
RESID(-1)	-1.044714	0.815001	-1.281857	0.4218
RESID(-2)	-2.397634	2.308421	-1.038647	0.4879
R-squared	0.636628	Mean dependent var	-3.49E-14	
Adjusted R-squared	-0.816859	S.D. dependent var	1.910086	
S.E. of regression	2.574623	Akaike info criterion	4.604190	
Sum squared resid	6.628682	Schwarz criterion	4.430657	
Log likelihood	-8.812571	Hannan-Quinn criter.	3.909520	
F-statistic	0.438001	Durbin-Watson stat	3.297939	
Prob(F-statistic)	0.794684			

Dari hasil output uji autokolerasi nilai probabilitas F(2.1) sebesar 0.6028 dapat juga disebut nilai probabilitas F hitung. Nilai probabilitas F 0.6028 > alpha 0.05 sehingga, berdasarkan uji hipotesis, H_0 diterima dan kesimpulannya tidak terjadi autokolerasi.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji VIF

Variance Inflation Factors
Date: 08/13/17 Time: 21:58
Sample: 2011 2016
Included observations: 6

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	26.77195	26.41657	NA
PBB	0.089093	41.64987	2.474074
BPHTB	0.048877	65.30774	2.474074

Dari hasil uji multikolinieritas menunjukkan pada tabel kolom Centered VIF, nilai VIF untuk variabel PBB 2.474074, dan Nilai VIF untuk variabel BPHTB 2.474074, kedua variabel tersebut tidak ada yang lebih dari 10. $VIF < 10$, berdasarkan syarat asumsi klasik regresi linier dengan OLS, maka model regresi yang baik adalah yang terbebas dari adanya multikolinieritas. Berdasarkan uji hipotesis, H_0 diterima yang artinya model regresi linier di atas telah terbebas dari adanya multikolinieritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Glejser

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	0.452123	Prob. F(2,3)	0.6736
Obs*R-squared	1.389636	Prob. Chi-Square(2)	0.4992
Scaled explained SS	0.606544	Prob. Chi-Square(2)	0.7384

Test Equation:
Dependent Variable: ARESID
Method: Least Squares
Date: 08/13/17 Time: 22:16
Sample: 2011 2016
Included observations: 6

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.381736	2.554515	0.932364	0.4199
PBB	-0.130234	0.147364	-0.883758	0.4419
BPHTB	0.050098	0.109149	0.458992	0.6775

R-squared	0.231606	Mean dependent var	1.440803
Adjusted R-squared	-0.280657	S.D. dependent var	1.075795
S.E. of regression	1.217435	Akaike info criterion	3.538222
Sum squared resid	4.446444	Schwarz criterion	3.434102
Log likelihood	-7.614667	Hannan-Quinn criter.	3.121420
F-statistic	0.452123	Durbin-Watson stat	1.859531
Prob(F-statistic)	0.673560		

Dari output hasil uji heteroskedastisitas model glejser, nilai probabilitas F-Statistik (F hitung) 0.6736 lebih besar dari tingkat alpha 0.05, probabilitas F hitung $>$ alpha 0.05, sehinggaberdasarkan uji hipotesis, H_0 diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi linier ini.

Uji Hipotesis

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

Dependent Variable: PAD Method: Least Squares Date: 08/12/17 Time: 19:38 Sample: 2011 2016 Included observations: 6				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	93.66928	5.174162	18.10328	0.0004
PBB	0.195191	0.298485	0.653938	0.5598
BPHTB	0.578203	0.221081	2.615349	0.0793
R-squared	0.890961	Mean dependent var		118.6600
Adjusted R-squared	0.818268	S.D. dependent var		5.784445
S.E. of regression	2.465911	Akaike info criterion		4.949852
Sum squared resid	18.24215	Schwarz criterion		4.845732
Log likelihood	-11.84956	Hannan-Quinn criter.		4.533050
F-statistic	12.25652	Durbin-Watson stat		2.861590
Prob(F-statistic)	0.036006			

Koefisien Determinasi

Dari hasil output di atas menunjukkan besarnya nilai adjusted R-squared sebesar 0,818 yang berarti variasi dua variabel PBB, dan BPHTB mampu menjelaskan 81,8% variasi variabel PAD. Jadi model regresi sangat baik, sedangkan sisanya 18,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Uji Signifikansi Simultan (F)

Hasil output di atas menunjukkan nilai F-Statistik 12.256 dengan Probabilitas $0.036 < 0.05$ (5%) maka dapat disimpulkan kedua variabel PBB, dan BPHTB secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap PAD.

Uji Signifikansi Parameter Individual (t)

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai variabel PBB $0.5598 > \alpha 0.05$ yang berarti tidak berpengaruh terhadap PAD, sedangkan nilai variabel BPHTB $0.0793 > \alpha 0.05$, yang berarti tidak berpengaruh terhadap PAD.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji hipotesis masing-masing variabel dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut,

Pengaruh PBB terhadap PAD Kabupaten Bekasi periode 2011-2016.

Dari hasil uji hipotesis dalam penelitian ini bahwa PBB tidak berpengaruh terhadap PAD. Dengan hasil perhitungan nilai probabilitas variabel PBB $0.5598 >$ tingkat signifikan 0.05 , dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak, pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa variabel PBB tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bekasi. Hal ini sama dengan penelitian sebelumnya oleh (Arditia, 2013), yang menguji pengaruh PBB terhadap PAD dengan hasil analisis bahwa PBB tidak berpengaruh terhadap PAD. Hal ini disebabkan karena yang diteliti adalah sebagian dari sebelas elemen pajak daerah Kabupaten Bekasi, sedangkan elemen dari PAD pun bukan hanya pajak daerah, melainkan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang dipisahkan, tentu saja kontribusinya tidak signifikan, dalam artian bahwa kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Bekasi rata-rata hanya 21.110% kepada Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh BPHTB terhadap PAD Kabupaten Bekasi periode 2011-2016.

Dari hasil uji hipotesis dalam penelitian ini bahwa BPHTB tidak berpengaruh terhadap PAD. Dengan hasil perhitungan nilai probabilitas BPHTB $0.0793\% >$ tingkat signifikan 0.05 , dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak, pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa variabel BPHTB tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bekasi. Hal ini sama dengan penelitian sebelumnya oleh (Kosasih et al., 2012), yang menguji pengaruh BPHTB terhadap PAD dengan hasil analisa bahwa BPHTB tidak berpengaruh terhadap PAD. Hal ini disebabkan karena yang diteliti adalah sebagian dari sebelas elemen pajak daerah Kabupaten Bekasi, sedangkan elemen dari PAD pun bukan hanya pajak daerah, melainkan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang dipisahkan, tentu saja kontribusinya tidak signifikan, dalam artian bahwa kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Bekasi rata-rata hanya 36.095% kepada Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh PBB dan BPHTB terhadap PAD Kabupaten Bekasi periode 2011-2016.

Dari hasil uji hipotesis dalam penelitian ini bahwa PBB dan BPHTB berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bekasi periode 2011-2016, dengan nilai probabilitas F-hitung $0.036 <$ tingkat signifikan 0.05 , dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima, pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa variabel PBB dan BPHTB berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bekasi periode 2011-2016. Hal ini sama dengan penelitian sebelumnya oleh (De Rooy & Budiarmo, 2015), yang menguji PBB dan BPHTB terhadap PAD dengan hasil analisa bahwa PBB dan BPHTB berpengaruh terhadap PAD. Hal ini disebabkan karena kontribusi PBB dan BPHTB digabung dan kontribusinya terhadap PAD sangat baik dengan rata-rata kontribusi 57.26% sangat dari tingkat klasifikasinya. Jadi secara simultan variabel PBB dan BPHTB berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bekasi periode 2011-2016.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai pengaruh dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi periode 2011 sampai dengan 2016, maka dapat disimpulkan, 1). Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa PBB berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Bekasi, yaitu dengan rata-rata 21.110% sisanya dari pajak daerah yang lainnya walaupun walaupun realisasi penerimaan PBB melebihi 100% dari target, tetapi yang diterima oleh PEMDA sebesar 21.110% yang kriterianya sedang, dan dari pengujian hipotesis pun pengaruh PBB tidak berpengaruh terhadap PAD, dikarenakan kontribusi yang hanya 21.110% terhadap PAD dari sebelas pajak daerah kabupaten Bekasi. 2). Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa BPHTB berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Bekasi, yaitu dengan rata-rata 36.095% , sisanya dari pajak daerah lainnya walaupun realisasi penerimaan BPHTB melebihi target 100% , tetapi yang diterima oleh PEMDA sebesar 36.095% yang kriterianya cukup baik. 3). Hasil pengujian hipotesis pun pengaruh BPHTB tidak berpengaruh terhadap PAD. dikarenakan kontribusinya 36.095% terhadap PAD dari sebelas pajak daerah Kabupaten Bekasi. 3). Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa PBB dan BPHTB berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Bekasi, yaitu rata-rata kontribusinya 57.26% , sisanya dari pajak daerah lainnya walaupun realisasi penerimaan PBB dan BPHTB melebihi 100% dari target, tetapi yang diterima oleh PEMDA sebesar 57.26% yang kriterianya sangat baik, dan dari hasil pengujian hipotesis pun pengaruh PBB dan BPHTB berpengaruh signifikan terhadap PAD, dikarenakan kontribusi mencapai 57.26% terhadap PAD dari sebelas pajak daerah Kabupaten Bekasi, karena PBB dan

BPHTB adalah pajak daerah yang paling besar kontribusinya terhadap pendapatan Asli Daerah.

Referensi

- Arditia, R. (2013). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerahkota Surabaya. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya*,(1979), 1–26.
- Atakpa, M., Ocheni, S., & Nwankwo, B. C. (2012). Analysis of options for Maximizing Local Government internally generated Revenue in Nigeria. *International Journal of Learning and Development*, 2(5), 94–104.
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika otonomi daerah*. UPP STIM YKPN.
- Cleveland, M. M. (2012). The economics of Henry George: a review essay. *American Journal of Economics and Sociology*, 71(2), 498–511.
- De Rooy, F., & Budiarmo, N. (2015). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Raja Ampat. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4).
- Elmi, B. (2002). Keuangan pemerintah daerah otonom di Indonesia. (No Title).
- Handoko, S. (2013). Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 1(1).
- Harjawati, T. (2016). Analisis Pertumbuhan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah. *Journal Social Science Education*.
- kemenkeu.go.id. (2004, October 15). *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah*. Kemenkeu.Go.Id.
- Kosasih, K., Maria, E., & Yusuf, A. (2012). Analisis Sistem Pajak BPHTB Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Karawang. *Majalah Ilmiah SOLUSI*, 11(24).
- Memah, E. W. (2013). Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Prasetyo, P. P. (2014). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 22(1), 38–46.
- Rachim, A. F., & Abd, H. (2015). Analyzing Local Revenue in Local Otonomy Implementation towards Self-Reliance of Samarinda Municipality. *International Journal of Business Management & Economic Research*, 6(6).
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2016). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Deepublish.
- Saputro, R., Sudjana, N., & Azizah, D. F. (2014). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pbb P2) terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2(1), 1–10.
- Shoup, D. C. (2004). The ideal source of local public revenue. *Regional Science and Urban Economics*, 34(6), 753–784.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. literasi media publishing.
- Suhono, S., & Sulastrri, E. M. (2017). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang. *Accountthink: Journal of Accounting and Finance*, 2(01).